

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dan Jepang merupakan negara kepulauan yang dikelilingi lautan. Namun ada satu perbedaan besar antara Indonesia dan Jepang, yaitu Indonesia memiliki banyak suku bangsa dan bahasa yang berbeda, sementara Jepang memiliki hanya satu suku yaitu orang Jepang dan satu bahasa Jepang, adapun dialek tergantung pada wilayahnya, namun secara keseluruhan tidak jauh berbeda dengan bahasa Jepang pada umumnya (Shindo, 2015:2).

Jepang disebut negeri Matahari Terbit atau Negeri Sakura. Bentuk pemerintahannya adalah kekaisaran yang dikepalai oleh seorang kaisar sekarang *Akihito*). Menurut kepercayaan bangsa Jepang, kaisar adalah keturunan Dewa Matahari atau Dewa *Amaterasu*. Jepang merupakan kerajaan konstitusional dengan kepala negaranya seorang Kaisar dan kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri. Parlemennya disebut *Diet* yang terdiri dari Dewan Perwakilan dan Dewan Penasihat. Semula Jepang merupakan negara tertutup dari pengaruh asing. Sejak tahun 1854, saat perpindahan kekuasaan dari *Shogun* kepada *Mikado* (kaisar), Jepang mulai berkembang. *Shogun* adalah orang-orang yang diberi kekuasaan mutlak oleh raja untuk memerintah suatu daerah. Raja pada waktu itu hanya mementingkan agama, hidup dalam biara dan dianggap sebagai dewa. Jepang mulai maju pesat

setelah adanya pengaruh dari barat. Kemenangan Jepang atas Rusia tahun 1904-1905 menambah kepercayaan orang-orang Jepang akan kemampuan dirinya. Pada permulaan Perang dunia II, Jepang mengalami kemenangan perang yang gemilang. Hampir seluruh negara di Asia dapat dikuasai, termasuk Indonesia, Malaysia dan Filipina. Namun akhirnya Jepang menyerah kepada Sekutu setelah Hiroshima dan Nagasaki dijatuhi bom atom oleh Amerika Serikat. Jepang menjadi porak poranda kembali. Keadaan ekonominya merosot tajam. Baru mulai tahun 1950 Jepang membangun kembali negaranya. Berkat sifat disiplin yang tinggi dan kerja keras yang tak mengenal lelah, maka Jepang tumbuh kembali dan menjadi salah satu negara industri yang sangat maju (www.sejarah-negara.com).

Namun, Indonesia dan Jepang sepertinya memang sulit untuk dipisahkan. Hubungan Diplomatik (hubungan antar negara dalam melaksanakan politik luar negeri) antara Indonesia dan Jepang dimulai pada tahun 1958, dengan penandatanganan perjanjian perdamaian antara Jepang dan Republik Indonesia. Pada tahun yang sama ditandatangani pula perjanjian pampasan perang. Perjanjian Pampasan Perang adalah pembayaran yang secara paksa ditarik oleh negeri pemenang perang kepada negeri yang kalah perang, sebagai ganti atas kerugian material. Penandatanganan Perjanjian Pampasan Perang terjadi pada tanggal 20 Januari 1958. Ditandatangani Menteri Luar Negeri Fujiyama dan Subandrio. Isinya adalah Jepang akan membayar \$223,080.000 selama 12 tahun, Jepang akan menghapuskan hutang Indonesia sebesar \$176.920.000, dan Jepang akan memberikan

antuan ekonomi sebesar \$400 Juta. Sedangkan untuk pembukaan jalur penerbangan antara Jepang dan Indonesia diadakan pada tahun 1963. Tercatat per Oktober 2009 jumlah warganegara Jepang yang tinggal di Indonesia ada 11.263 orang. Sedangkan tercatat per Desember 2008 jumlah warganegara Indonesia yang tinggal di Jepang ada 17.250 orang (www.id.emb-japan.go.jp).

Dari sisi Jepang sendiri, pencarian mitra dalam diplomasi yang paling nencolok pernah terjadi yang dikenal dengan Doktrin Fukuda. Sudah sejak Agustus 1977 pola diplomasi yang dianut Jepang adalah doktrin Fukuda yang dikemukakan oleh Perdana Menteri (PM) saat itu, Takeo Fukuda, yang dikenalkannya dengan diplomasi "dari hati ke hati" (*heart to heart diplomacy*) ke Selatan, yakni ASEAN tahun 1977, termasuk dalam hubungan perdagangan (Antara News, 2012). Rakyat Jepang yakin Fukuda adalah sosok pemimpin yang tepat untuk mengatasi semua masalah pelik sekaligus mempersatukan kembali Jepang. Pasalnya, dia memiliki karakter sebagai pemimpin yang matang, santun, dan memiliki pandangan moderat. Sosoknya dinilai kebalikan dari Abe yang dicitrakan lebih ambisius, memiliki pandangan kuat, namun garang. Perdana Menteri Fukuda bertekad bahwa Jepang sebagai negara yang mengikatkan diri pada perdamaian, tidak akan pernah menjadi suatu kekuatan militer dan bahwa Jepang akan membangun hubungan atas dasar saling mempercayai dengan Negara Negara Asia Tenggara dalam bidang-bidang yang luas, dan bahwa Jepang akan bekerjasama secara positif dengan ASEAN dan negara-negara anggotanya dalam upaya masing masing, sebagai

mitra yang sederajat. Maka dari doktrin Fukuda inilah yang menjadi benang merah terbentuknya hubungan yang baik antara Jepang dan Indonesia (www.merrynester-fisip11.web.unair.ac.id).

Secara historis memang Indonesia pernah menjadi negara jajahan Jepang. Tentunya hal ini menjadi suatu hambatan hubungan bagi Jepang dan Indonesia. Namun, beberapa usaha Jepang dalam member bantuan kepada Indonesia telah berhasil memperbaiki lagi hubungan Indonesia dan Jepang. Kehadiran Doktrin Fukuda juga memiliki peran penting dalam hal ini. Doktrin ini memperlihatkan betapa Jepang ingin menjadi negara yang bersahabat. Melihat semua ini, dapat kita simpulkan bahwa baik Indonesia dan Jepang masing-masingnya memiliki kepentingan dalam hubungan ini. Kedua negara saling membutuhkan dan arena itu perlu adanya kesinambungan dalam hubungan diplomasi antara Jepang dan Indonesia (www.merrynester-fisip11.web.unair.ac.id).

Menurut Djumara Suryadi dalam majalah Akses terbitan bulan Oktober tahun 2007, kerja sama ekonomi Indonesia-Jepang mencapai puncaknya di masa orde baru. Hubungan kedua negara suka atau tidak suka pernah diisi oleh lembaran sejarah yang tidak terlalu indah. Indonesia selama hampir tiga setengah tahun (1941-1945) mengalami kepududukan Jepang. Kepududukan tersebut masih berkaitan dengan ambisi Jepang yang ketika itu ingin menjadi pemimpin di Asia Timur Raya. Secara politik, Indonesia bagi Jepang merupakan salah satu negara yang penting di ASEAN (Association of South East Asian Nations). Jepang melihat Indonesia sebagai negara

ntai yang punya peran signifikan (peran yang memiliki pengaruh besar) dalam mengamankan selat malaka (selat yang menjadi jalur pelayaran dan perdagangan antara Jepang). Sebaliknya Jepang bagi Indonesia secara ekonomi menduduki posisi yang sangat strategis. Pada tahun 2007, bertepatan dengan kunjungan PM Jepang Shinzo Abe ke Indonesia, kedua negara telah menandatangani EPA (Economic Partnership Agreement/Persetujuan Kemitraan Ekonomi). Peran EPA sangat krusial terhadap peningkatan hubungan bilateral kedua negara (Akses, 2007:10).

Sebenarnya jauh sebelum Perang Dunia II, yaitu konflik militer global yang terjadi pada 1 September 1939- 2 September 1945 yang melibatkan sebagian besar negara di dunia, di Afrika, Asia dan Eropa, telah terjadi hubungan antara tokoh-tokoh nasionalis Indonesia dengan pihak Jepang, antara lain Gatot Mangkupraja dan Moh. Hatta. Sesudah kunjungannya ke Jepang. Pada akhir tahun 1933, Gatot Mangkupraja berkeyakinan bahwa Jepang dengan gerakan PAN-Asianya mendukung pergerakan nasional Indonesia. Moh. Hatta adalah tokoh yang memegang teguh paham nasionalisme. Meskipun ia secara tegas menolak imperialisme Jepang (sebuah kebijakan dimana negara besar dapat memegang kendali atau pemerintahan atas daerah atau negara lain), tetapi ia tidak mengecam perjuangan Jepang melawan ekspansi (perluasan wilayah) negara-negara barat. Moh. Hatta bersedia bekerja sama dengan Jepang karena ia berkeyakinan pada ketulusan Jepang dalam mendukung kemerdekaan Indonesia. Hal itu sesuai dengan propaganda (tindakan yang bertujuan

untuk menghasut atau mempengaruhi) Jepang sebelum melakukan penyerbuan ke Asia Tenggara termasuk Indonesia (Mustopo dkk, 2006 : 51).

Faktor lain yang menyebabkan timbulnya simpati rakyat Indonesia kepada Jepang adalah sikap keras pemerintah Hindia Belanda menjelang akhir kekuasaannya. Pada tahun 1938, pemerintah kolonial menolak petisi sutardjo (petisi yang diajukan oleh Soetardjo Kartohadikoesoemo pada 15 Juli 1936 kepada Ratu Wilhelmina serta Parlemen di negeri Belanda, petisi ini diajukan karena semakin meningkatnya perasaan tidak puas dikalangan rakyat terhadap pemerintahan akibat kebijaksanaan politik yang dijalankan Gubernur Jenderal de Jonge) yang meminta pemerintahan sendiri bagi bangsa Indonesia dalam lingkungan kekuasaan Belanda sesudah 10 tahun. Setahun kemudian, Belanda pun menolak usulan dari Gabungan Politik Indonesia (GAPI) yang dirumuskan dalam slogan Indonesia Berparlemen. Penolakan-penolakan itu menimbulkan keyakinan kaum pergerakan nasional Indonesia bahwa pihak Belanda tidak akan memberikan kemerdekaan. Di lain pihak, Jepang sejak awal sudah mengumandangkan kemerdekaan bangsa-bangsa asia (Mustopo dkk, 2006 : 51).

Pada 8 Maret 1942, Panglima Angkatan Perang Hindia Belanda Letnan Jenderal H. Ter Poorten menyerah tanpa syarat kepada pimpinan tentara Jepang Letnan Jenderal Hitoshi Imamura. Hal itu menandai berakhirnya masa pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia dan digantikan oleh pemerintahan pendudukan Jepang. Meningkatnya Perang Pasifik (perang yang terjadi di Samudra Pasifik pada tahun 1937-1945) semakin melemahkan Angkatan Perang Jepang. Guna menahan ofensif

sekutu yang semakin hebat, Jepang mengubah sikapnya terhadap negeri-negeri yang didudukinya. Didepan sidang istimewa ke-82 Parlemen di Tokyo pada tanggal 16 Juni 1943, Perdana Menteri Tojo mengeluarkan kebijakan memberikan kesempatan kepada orang Indonesia untuk turut mengambil bagian dalam pemerintahan negara. Selanjutnya pada tanggal 1 Agustus 1943 dikeluarkan pengumuman *Saiko Shikikan* (Panglima Tertinggi) tentang garis-garis besar rencana mengikutsertakan orang-orang Indonesia dalam pemerintahan (Mustopo dkk, 2006 : 52).

Didalam propaganda yang menjanjikan, ternyata Jepang bertindak kejam. Jepang telah mengerahkan semua potensi dan kekuatan yang ada untuk menopang perang yang sedang mereka hadapi untuk melawan sekutu. Di pulau Jawa, *kenpetai* (Polisi Militer) Jepang mengurus aset kekayaan yang dimiliki rakyat untuk memenangkan perang dan melanjutkan industri di negerinya (Kemendikbud, 2014 : 36). Kekayaan alam di Indonesia sangat menarik perhatian Jepang, yang sangat memerlukan bahan baku untuk industrinya. Terutama minyak bumi, karet, timah dan boksit, bahan baku tersebut sangat diperlukan sekali oleh Jepang. Teristimewa minyak bumi dari Indonesia, Jepang ingin memperolehnya dalam jumlah besar (Tugiyono, 1985 : 174).

Selama masa pendudukan Jepang di Indonesia, diterapkan konsep “Ekonomi Perang”. Artinya semua kekuatan ekonomi di Indonesia digali untuk menopang kegiatan perang. Sebelum memasuki Perang Dunia II, Jepang sudah berkembang menjadi negara industri dan sekaligus menjadi kelompok negara imperialis di Asia.

Oleh karena itu, Jepang melakukan berbagai upaya untuk memperluas wilayahnya. Sasaran utamanya antara lain Korea dan Indonesia. Dalam bidang ekonomi, Indonesia sangat menarik bagi Jepang. Sebab Indonesia merupakan kepulauan yang begitu kaya akan berbagai hasil bumi, pertanian, tambang, dan lain-lainnya. Kekayaan Indonesia tersebut sangat cocok untuk kepentingan industri Jepang. Indonesia juga dirancang sebagai tempat penjualan produk-produk industrinya. Meletusnya Perang Dunia II pada hakekatnya merupakan wujud konkret dari ambisi dan semangat imperialisme masing-masing negara untuk memperluas daerah kekuasaannya. Oleh karena itu, pada saat berkobarnya Perang Dunia II, Indonesia benar-benar menjadi sasaran perluasan pengaruh kekuasaan Jepang. Bahkan Indonesia kemudian menjadi salah satu benteng pertahanan Jepang untuk membendung gerak laju kekuatan Belanda (Kemendikbud, 2014 : 37).

Pemerintah Jepang mulai membatasi kegiatan pendidikan. Jumlah sekolah juga dikurangi secara drastis. Jumlah sekolah dasar menurun dari 21.500 menjadi 13.500. Sekolah lanjutan menurun dari 850 menjadi 20. Kegiatan perguruan tinggi tidak berjalan lancar. Jumlah murid sekolah dasar menurun 30% dan jumlah siswa sekolah lanjutan merosot sampai 90%. Begitu juga tenaga pengajarnya mengalami penurunan secara signifikan. Muatan kurikulum yang diajarkan juga dibatasi. Mata pelajaran bahasa Indonesia dijadikan mata pelajaran utama, sekaligus sebagai bahasa pengantar. Kemudian bahasa Jepang menjadi mata pelajaran wajib di sekolah (Kemendikbud, 2014 : 40).

Akibat keputusan pemerintah Jepang tersebut, membuat angka buta huruf menjadi meningkat. Oleh karena itu, pemuda Indonesia mengadakan program pemberantasan buta huruf yang dipelopori oleh Poetera (Poesat Tenaga Rakyat). Berdasarkan kenyataan tersebut, dapat dikatakan bahwa kondisi pendidikan di Indonesia pada masa pendudukan Jepang mengalami kemunduran. Kemunduran pendidikan itu juga berkaitan dengan kebijakan pemerintah Jepang yang lebih berorientasi pada kemiliteran untuk kepentingan pertahanan Indonesia dibandingkan pendidikan. Banyak anak usia sekolah yang harus masuk organisasi semi militer sehingga banyak anak yang meninggalkan bangku sekolah. Bagi Jepang, pelaksanaan pendidikan bagi rakyat Indonesia bukan untuk membuat pandai, tetapi dalam rangka untuk pembentukan calon-calon yang memelopori program kemakmuran bersama Asia Timur Raya. Oleh Karena itu, sekolah selalu menjadi tempat indoktrinasi Jepang (Kemendikbud, 2014 : 41).

Setelah Jepang melihat bayang-bayang kekalahan dari Sekutu, dan Perdana Menteri Kuniaki Koiso mengumumkan janji kemerdekaan Indonesia dikemudian hari, sejumlah tentara Jepang memihak Indonesia. Pada Juli 1944 Jepang berada di ujung tanduk. Kepulauan Saipan (Ibu Kota Kepulauan Mariana Utara di Samudra Pasifik Barat) jatuh ke tangan sekutu. Garis pertahanan di Pasifik, yakni Kepulauan Solomon (sebuah negara kepulauan di Samudra Pasifik bagian selatan, disebelah timur Papua Nugini) dan Kepulauan Marshall (terletak di Samudra Pasifik bagian barat) bobol. Sebulan kemudian, Perdana Menteri Kuniaki Koiso mengumumkan Indonesia

diperkenankan merdeka di kemudian hari. Berita tersebut menyebar. Menjelang Proklamasi, banyak kelompok-kelompok pemuda yang bermunculan di Jakarta. Kelompok ini dapat diklasifikasikan sebagai organisasi illegal atau bergerak bawah tanah melawan Jepang. Di antaranya yaitu Kelompok Amir Syarifuddin, Kelompok Syahrir, Kelompok Sukarni, Kelompok Menteng 31, Asrama Angkatan Baru, Kelompok Subarjo atau Kelompok *Kaigun*, Asrama Indonesia Merdeka, Kebon Siri 80, Kelompok Pemuda dan Mahasiswa, Barisan Pelopor Istimewa, Gerindom (Gerakan Indonesia Merdeka), dan Kelompok Buruh (Suhartono, 2007 : 85-94).

Jepang yang pada masa itu (1942-1945) masih menjajah Indonesia, ada tokoh Angkatan Laut (*Kaigun*) Jepang yang membantu Indonesia. Dia adalah Laksamana Muda Maeda. Info sejarah mengenai Laksamana Maeda yang terdapat pada buku-buku teks sejarah Indonesia, sebagian besar hanya menceritakan bahwa Maeda hanya membantu Indonesia dalam proses proklamasi. Yaitu, menyediakan rumahnya bagi para nasionalis Indonesia ketika mereka menyusun teks proklamasi pada malam 16 Agustus 1945. Dalam Kelompok *Kaigun* yang dipimpin Subardjo, terdapat peran Laksamana Maeda yang turut merekonstruksi kelompok *Kaigun*. Karena Maeda adalah pimpinan dari *Kaigun* (Angkatan Laut Jepang) tersebut. Maeda adalah aktor intelektual yang bekerja dibelakang tirai dan memainkan teater kelompok *Kaigun* di tengah panggung politik pendudukan Jepang (Suhartono, 2007 : 103).

Cerita kedekatan Laksamana Maeda dengan Indonesia Sejatinya terjadi jauh sebelum malam jelang kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 16 Agustus 1945.

Maeda pernah menjadi atase (wakil) militer Jepang di Den Hag Belanda, dan Jerman pada masa sebelum perang sekitar tahun 1930. Saat itu, Maeda kerap berhubungan dengan sejumlah tokoh pelajar dan Nasionalis Indonesia, seperti Nazir Pamuntjak, Ahmad Subarjo, Mohammad Hatta dan AA. Maramis (www.news.liputan6.com).

Maeda merupakan tokoh yang sudah tidak asing dalam historiografi Indonesia. Hal ini dapat terlihat dari hasil pencapaiannya sebagai figur dalam perjalanan sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Di dalam buku teks sejarah Indonesia, figur Maeda digambarkan sebagai seorang perwira tinggi Angkatan Laut Jepang yang ikut berjasa dalam kemerdekaan Indonesia. Di pihak lain, di negara Jepang, figur Maeda kurang begitu dikenal. Hal inilah yang menyebabkan penulisan mengenai Maeda kurang diminati oleh sejarawan Jepang (Bramantya, 2017:2).

Tadashi Maeda lahir di Kajiki, prefektur Kagoshima, Kyushu, Jepang, Maeda lahir dari Ibu bernama Tei dan Ayah bernama Jinzo. Ayahnya bekerja sebagai guru SD sekaligus menjabat sebagai kepala sekolah. Maeda dilahirkan dari keluarga sederhana dan memiliki banyak saudara. Salah satu kakak laki-laknya bekerja di Angkatan Laut dengan pangkat Laksamana (*Kaigun Chuujō*) (Bramantya, 2017:3).

Pada penelitian ini akan difokuskan mengenai keterlibatan dari tokoh Laksamana Maeda. Laksamana Maeda atau Laksamana Muda Maeda Tadashi adalah seorang perwira tinggi angkatan laut kekaisaran Jepang di Hindia Belanda pada masa perang Pasifik. Laksamana Maeda adalah Tokoh Jepang yang justru berpihak kepada Indonesia pada masa penjajahan Jepang di Indonesia. Untuk mengetahui lebih jauh tentang keterlibatan Laksamana Maeda pada masa proses kemerdekaan Indonesia,

penulis akan mencoba membahasnya melalui skripsi yang berjudul : **“Dampak Keterlibatan Laksamana Maeda Dalam Proses Kemerdekaan Bangsa Indonesia (1942-1945)”**.

B.Rumusan dan Batasan Masalah

1.Rumusan Masalah

Melalui uraian latar belakang di atas, adapun masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah :

- a. Apakah Konsekuensi terhadap Laksamana Maeda sebagai tentara Jepang karena telah terlibat dalam kemerdekaan Indonesia?

2. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis membatasi permasalahannya kepada hal yang berkaitan dengan kisah Laksamana Maeda, dari latar belakang, kehidupan, hingga proses kisah nya pada masa tinggal di Indonesia saat Penjajahan Jepang (1944-1945).

C.Tujuan dan Manfaat Penelitian

Setiap peneliti pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai dan harus mempunyai manfaat bagi orang lain. Berikut ini merupakan tujuan dan manfaat dari penelitian yang penulis lakukan.

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang telah diuraikan di atas, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui konsekuensi seperti apa yang diterima Laksamana Maeda karena telah terlibat dalam kemerdekaan Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini diantaranya adalah :

a. Manfaat Teoretis

Dapat menggali lebih dalam lagi mengenai sejarah mengenai Laksamana Maeda dalam upaya membantu kemerdekaan Indonesia.

b. Manfaat Praktis

1. Menambah pengetahuan akan sejarah mengenai kisah tentara Jepang yang membantu kemerdekaan Indonesia, yang difokuskan pada kisah Laksamana Maeda pada pembaca, khususnya Mahasiswa STBA JIA dan peneliti sendiri.
2. Menambah referensi bagi peneliti yang akan mengangkat tentang kisah tentara Jepang, yang membelot dari Jepang pada zaman pendudukan pemerintah Jepang di Indonesia (1942-1945).

D. Definisi Operasional

Untuk menghindari perbedaan persepsi dan mencapai kesamaan arti antara penulis dengan pembaca, maka akan diuraikan arti dari istilah-istilah yang terdapat pada judul penelitian ini. Diharapkan pembaca memiliki pandangan yang sama dengan penulis pada saat membaca penelitian ini.

1. Keterlibatan, merupakan sebuah tindakan yang melibatkan, atau keadaan terlibat (www.kamus-internasional.com).
2. Laksamana Maeda, merupakan Orang Jepang yang menjabat sebagai kepala kantor penghubung angkatan laut dan angkatan darat, yang secara diam-diam membantu pergerakan kemerdekaan Indonesia (www.nosleepmedia.org).
3. Kemerdekaan, dalam konteks politik dan sosial, kemerdekaan secara tradisional dipikirkan sebagai bebas untuk melakukan :
 - a. Apa yang untuknya tidak terdapat alasan biasa atau alasan baik lain yang menentang melakukannya (setiap campur tangan otoritas harus dibenarkan oleh alasan-alasan yang masuk akal seperti bahaya bagi kesehatan masyarakat, ancaman bagi keamanan dan kesejahteraan orang-orang lain).
 - b. Yang tidak merintang (mencampuri, merugikan, menghalangi, memaksa) kegiatan-kegiatan orang lain dan hak-haknya. Kemerdekaan dianggap

sebagai suatu hak kodrat yang tidak dapat dicabut (bersama dengan hidup, harta, dan pengejaran kebahagiaan).

Dalam penggunaan modern baik di Perancis maupun di Inggris, istilah liberty (kemerdekaan) dipakai untuk menyatakan kedua arti itu. Dan demikian halnya dengan istilah liberie di Perancis hingga sekarang ini. Di Inggris, walaupun kedua istilah itu digunakan dalam kedua arti diatas, ada kecendrungan menggunakan istilah freedom (kebebasan) untuk menunjuk kepada situasi pilihan metafisis, dan istilah liberty (kemerdekaan) untuk mengacu kepada bidang manusia yang tidak dihambat di dalam masyarakat (www.arti-definisi.com)

4. Pan Asia (Pan-Asianism, juga dikenal sebagai Asianism atau Greater Asianism) adalah sebuah ideologi yang mempromosikan kesatuan bangsa Asia (www.astalog.com).

E.Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi dari suatu penelitian, maka penulisan suatu karya ilmiah seperti skripsi perlu disusun secara sistematis. Sistematika yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi 5 bab dengan pokok bahasan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, yang di dalamnya terdapat latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan kerangka teori yang terdiri dari tinjauan pustaka dan landasan teori yang menjelaskan teori-teori yang digunakan dalam penelitian.

Bab III merupakan metode penelitian, waktu dan lokasi penelitian, prosedur penelitian yang mencakup persiapan penelitian, implementasi data, dan tahap pelaporan, kemudian teknik pengumpulan data, analisis data, dan sumber data.

Bab IV merupakan bagian yang menjelaskan konsekuensi yang diterima Laksamana Maeda karena telah membantu kemerdekaan Indonesia dengan menguraikan tentang jenis metode yang digunakan, teknik pengumpulan data, proses penelitian, objek penelitian, dan sumber data.

Bab V merupakan bagian penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran.